

## Perekonomian Indonesia Setelah Kemerdekaan

Cindy Amelia Putri <sup>1</sup>, Lian Diza Loriva Siregar <sup>2</sup>, M. Hanif Abrar <sup>3</sup>, Nur Azmi Rahmadhini <sup>4</sup>, Reni Ria Armayani Hasibuan <sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Corresponding Author: [yunkisun299@gmail.com](mailto:yunkisun299@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [liansiregar2002@gmail.com](mailto:liansiregar2002@gmail.com)<sup>2</sup>, [hanifabrar87@gmail.com](mailto:hanifabrar87@gmail.com)<sup>3</sup>, [dhininur899@gmail.com](mailto:dhininur899@gmail.com)<sup>4</sup>, [reniriaarmayani@uinsu.ac.id](mailto:reniriaarmayani@uinsu.ac.id)<sup>5</sup>

### Info Artikel

**Submitted:** 06 Januari 2026

**Revised :** 09 Januari 2026

**Accepted:** 13 Januari 2026

**Published:** 17 Januari 2026

**Keywords:** Economic Policy, Old Order, New Order, Reformation, Economic Growth

**Kata Kunci:** Kebijakan Ekonomi, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Pertumbuhan Ekonomi

### Abstract

*This study aims to systematically outline the journey of the Indonesian economy post-independence, focusing on the dynamics of economic policy from the Old Order regime to the Reformation era. Using a descriptive-analytical approach, this article highlights how shifts in political orientation affect macroeconomic stability, growth, and national socio-economic aspects. The results of the study show that the Old Order period was characterized by instability due to political dominance over the economy which triggered extreme inflation. The New Order succeeded in rapid stabilization and industrialization but created structural vulnerabilities due to the practice of corruption, collusion, and nepotism (KKN). The transition and Reformation periods became crucial turning points that introduced fiscal decentralization and digital transformation. The research conclusion emphasizes that Indonesia's economic sustainability depends heavily on the balance between high growth, social equity, transparent governance, and adaptation to technological innovation in the era of globalization.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis perjalanan perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan dengan fokus pada dinamika kebijakan ekonomi dari rezim Orde Lama hingga era Reformasi. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini menyoroti bagaimana pergeseran orientasi politik memengaruhi stabilitas makroekonomi, pertumbuhan, dan aspek sosial-ekonomi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa masa Orde Lama ditandai dengan ketidakstabilan akibat dominasi politik atas ekonomi yang memicu inflasi ekstrem. Orde Baru berhasil melakukan stabilisasi dan industrialisasi yang pesat, namun menciptakan kerentanan struktural akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masa transisi dan Reformasi menjadi titik balik krusial yang memperkenalkan desentralisasi fiskal serta transformasi digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan tinggi, pemerataan sosial, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta adaptasi terhadap inovasi teknologi di era globalisasi.



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher:** Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

## Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 merupakan titik awal bagi bangsa ini untuk

membangun tatanan ekonomi secara mandiri, meskipun dihadapkan pada kerusakan infrastruktur dan hiperinflasi pasca-kolonial. Kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan karena ketidakstabilan politik dan minimnya pengalaman dalam pengelolaan makroekonomi nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Soekarno berupaya melakukan rekonstruksi melalui berbagai kebijakan strategis demi melepaskan diri dari sisa-sisa pengaruh ekonomi Belanda yang masih mendominasi sektor vital. Perjalanan sejarah kemudian mencatat bahwa setiap pergantian rezim, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, membawa paradigma dan arah kebijakan ekonomi yang berbeda, yang secara kolektif membentuk wajah ekonomi Indonesia saat ini (Fahriska dan Zulkifli, 2020).

Urgensi dari kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami akar historis kebijakan ekonomi nasional guna menarik pelajaran berharga dari kegagalan dan keberhasilan masa lalu. Dinamika ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tatanan politik yang melingkupinya seperti setiap kebijakan yang lahir merupakan refleksi dari respon pemerintah terhadap tantangan global maupun domestik pada masanya. Perubahan dari sistem ekonomi yang tertutup menjadi lebih terbuka menunjukkan adanya evolusi dalam strategi pembangunan nasional yang berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (HERMANITA, 2021). Dengan menganalisis perubahan fundamental tersebut, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi historis, tetapi juga sebagai instrumen analitis untuk memetakan strategi kebijakan ekonomi di masa depan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan yang semakin kompleks (Supriatin et al, 2022).

Penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana efektivitas kebijakan ekonomi pada tiap periode pemerintahan dalam mencapai stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan sosial. Melalui tinjauan komprehensif, artikel ini bertujuan mengevaluasi dampak kebijakan dari masa kepemimpinan Soekarno hingga era digital di bawah pemerintahan Joko Widodo. Fokus analisis ditekankan pada perubahan struktur ekonomi, penanganan krisis, serta isu-isu krusial seperti kemiskinan dan ketimpangan. Diharapkan, hasil analisis ini dapat memperkuat literasi akademik dalam memahami konteks ekonomi Indonesia secara holistik (Inanna dan Nurjannah, 2023). Pemahaman yang mendalam mengenai sejarah ekonomi sangat penting agar pengambil kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih inklusif, adaptif, dan berdaya saing dalam jangka panjang di tengah kancah perekonomian dunia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi perjalanan ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literatur akademik, buku teks, dan jurnal ilmiah terbitan tahun 2021-2025 untuk menjamin aktualitas informasi. Objek penelitian mencakup dinamika kebijakan ekonomi pada empat periode utama: Orde Lama, Orde Baru, Masa Transisi, dan Reformasi. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan membandingkan indikator pertumbuhan, inflasi, dan struktur ekonomi antar-rezim guna menemukan pola keberhasilan dan kegagalan pembangunan nasional. Teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber dari berbagai perspektif peneliti terdahulu untuk memastikan obyektivitas dan kedalaman analisis terhadap data historis yang tersedia (Waruwu, 2023).

## **Hasil dan Pembahasan**

Masa Orde Lama ditandai dengan upaya keras pemerintah untuk menstabilkan ekonomi di tengah gejolak politik dalam dan luar negeri. Pada periode awal kemerdekaan hingga 1959, Indonesia menerapkan sistem ekonomi liberal yang sayangnya tidak memberikan hasil signifikan bagi kesejahteraan rakyat karena seringnya pergantian kabinet. Salah satu langkah besar yang diambil pemerintah adalah melakukan nasionalisasi aset-aset penting, namun kebijakan ini sering kali terhambat oleh keterbatasan modal dan tenaga ahli (Wijayanti, 2022). Selain itu, untuk memperkuat pengusaha domestik, pemerintah meluncurkan kebijakan yang dikenal untuk memberikan perlindungan khusus bagi pengusaha pribumi (Rahman, 2023). Namun, upaya ini belum mampu menciptakan struktur ekonomi yang mandiri karena kuatnya persaingan dengan pengusaha etnis lain.

Kondisi ekonomi semakin memburuk ketika Indonesia memasuki fase Demokrasi Terpimpin yang menerapkan sistem ekonomi komando. Pada masa ini, pengambilan keputusan ekonomi sangat sentralistik dan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik mercusuar (Rakhman dan Hidayat, 2022). Akibatnya, defisit anggaran membengkak dan memicu hiperinflasi yang mencapai puncaknya pada pertengahan 1960-an. Hal ini diperparah dengan hubungan internasional yang memburuk, sehingga bantuan modal dari luar negeri terhenti. Secara keseluruhan, paradigma ekonomi pada masa Orde Lama menunjukkan kegagalan dalam menjaga stabilitas makroekonomi akibat prioritas politik yang lebih besar dibandingkan logika ekonomi pembangunan (Shodiq dan Maula, 2025).

Transisi menuju Orde Baru membawa perubahan drastis dalam orientasi ekonomi Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Langkah awal yang diambil adalah melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi untuk menghentikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur yang rusak (Dwicahyo, 2022). Pemerintah membuka pintu bagi investasi asing dan menjalin kerja sama kembali dengan lembaga keuangan internasional demi mendapatkan modal pembangunan. Fokus utama pembangunan diarahkan pada sektor pertanian melalui program Swasembada Beras yang terbukti sukses meningkatkan produktivitas pangan nasional (Ningrum, 2023). Pembangunan pada masa ini disusun secara sistematis melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Keberhasilan Orde Baru dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 6-7% per tahun selama hampir tiga dekade memang patut diapresiasi, namun sistem ini memiliki celah yang besar. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur di balik stabilitas semu yang diciptakan oleh pemerintahan otoriter (Shaleha dan Muharman, 2024). Konsentrasi kekayaan pada segelintir elite menciptakan kerentanan struktural yang sangat berbahaya bagi ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Ketika krisis moneter menghantam Asia pada tahun 1997, fondasi ekonomi Indonesia yang rapuh tidak mampu bertahan, menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh dan memicu kemarahan publik yang berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru.

Masa transisi yang diikuti oleh era Reformasi menjadi titik balik krusial bagi Indonesia untuk membenahi sistem ekonomi dan politiknya. Presiden B.J. Habibie memikul tanggung jawab besar untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menstabilkan perbankan nasional di tengah kekacauan (Klaudia dan Wartha, 2020). Langkah-langkah restrukturisasi dilakukan dengan pengawasan ketat dari IMF guna memastikan pemulihan berjalan sesuai rencana. Masa transisi ini juga menekankan pentingnya otonomi daerah agar pembangunan tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi juga menyentuh pelosok negeri (Hasan, 2021). Perubahan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia setelah sekian lama berada dalam sistem sentralistik.

Di era Reformasi, tantangan ekonomi menjadi lebih kompleks seiring dengan tuntutan demokratisasi dan transparansi di segala bidang. Pemerintah berupaya menghapus praktik-praktik ekonomi yang merugikan rakyat kecil, namun pola relasi bisnis dan politik yang koruptif terkadang masih muncul kembali dalam bentuk baru (Solihah, 2023). Meski demikian, kebebasan berpendapat dan pers mempermudah kontrol publik terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Pembangunan di era ini lebih menekankan pada keberlanjutan dan penguatan daya saing nasional

di pasar global yang semakin kompetitif (Dzaki, 2024). Transformasi ini menandai kedewasaan bangsa dalam mengelola konflik kepentingan demi tujuan pembangunan nasional.

Salah satu perubahan paling fundamental di era Reformasi adalah penguatan kebijakan desentralisasi yang memberikan wewenang luas bagi daerah dalam mengelola anggarannya sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa sistem yang terlalu terpusat sering kali mengabaikan potensi lokal dan memicu ketidakpuasan daerah (Suriadi dan Frinaldi, 2023). Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan mampu berinovasi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, pelaksanaan otonomi ini juga memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran di tingkat daerah. Dinamika ini menjadi bagian penting dari evolusi sistem tata kelola negara yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput.

Stabilitas ekonomi pasca-krisis 1998 menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang konsisten meskipun dihadapi oleh tantangan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dunia. Pemerintah terus melakukan reformasi di sektor keuangan dan perpajakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara (Mawar Az-Zahra et al, 2024). Peningkatan investasi di sektor infrastruktur dan pendidikan menjadi prioritas guna mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Di samping itu, penguatan sektor UMKM menjadi salah satu strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik dari guncangan krisis global. Prospek ekonomi ke depan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi struktural secara menyeluruh (Hadi et al, 2024).

Globalisasi membawa perubahan besar dalam cara bisnis dilakukan di Indonesia, di mana teknologi menjadi faktor determinan dalam persaingan pasar. Penggunaan teknologi informasi telah mengubah lanskap bisnis dari model konvensional menjadi digital yang lebih efisien dan transparan (Dwi Lestari dan Merthayasa, 2022). Pemerintah pun merespon fenomena ini dengan membangun infrastruktur digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan startup lokal. Digitalisasi tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi mulai merambah ke desa-desa melalui program internet masuk desa. Hal ini membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengakses pasar yang lebih luas tanpa terkendala oleh jarak geografis.

Kehadiran ekonomi digital di era Reformasi juga menuntut adanya regulasi yang adaptif untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah harus memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak justru memperlebar jurang ketimpangan antara mereka yang melek teknologi dan yang tertinggal. Transformasi digital dipandang sebagai motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih dinamis dan modern (Fernandez, 2024). Dengan dukungan ekosistem

inovasi yang baik, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan kreativitas masyarakat menjadi kunci utama dalam memenangkan persaingan di era industri 4.0.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan PDB, tetapi juga dari tingkat keadilan sosial yang dirasakan oleh rakyat. Sejarah mencatat bahwa kegagalan di masa lalu sering kali disebabkan oleh pengabaian terhadap aspek pemerataan (Fahrika dan Zulkifli, 2020). Oleh karena itu, kebijakan ekonomi saat ini harus selalu mengedepankan prinsip inklusivitas agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika ekonomi yang cepat. Evaluasi secara berkala terhadap setiap kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar.

Melalui perbandingan antar-era, kita dapat melihat bahwa Indonesia telah menempuh perjalanan yang panjang dan berliku untuk mencapai keamanan ekonomi seperti saat ini. Dari masa ekonomi komando yang kaku hingga ekonomi digital yang fleksibel, setiap periode memberikan pelajaran berharga bagi masa depan bangsa (HERMANITA, 2021). Tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan lingkungan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam kini mulai menjadi tren baru dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Inovasi hijau diharapkan dapat menjadi solusi bagi pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

Reformasi birokrasi dan perbaikan iklim investasi tetap menjadi agenda utama guna menarik minat pemodal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ketegasan hukum dan kepastian regulasi merupakan faktor kunci yang selalu diperhatikan oleh investor (Supriatin et al, 2022). Tanpa adanya tata kelola yang bersih, mustahil bagi Indonesia untuk mencapai potensi ekonomi maksimalnya. Upaya pemberantasan korupsi harus terus digalakkan agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Transformasi mental dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya pelayanan publik yang prima dan efisien.

Peran sektor swasta juga tidak kalah penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan inovasi produk. Kerja sama yang harmonis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil akan menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan tangguh (Inanna dan Nurjannah, 2023). Pendidikan berbasis kompetensi yang selaras dengan

kebutuhan industri perlu ditingkatkan agar lulusan sekolah dan universitas siap bersaing di pasar kerja. Selain itu, riset dan pengembangan (R&D) harus mendapat perhatian lebih agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga mampu menghasilkan teknologi sendiri. Kemandirian ekonomi merupakan cita-cita luhur yang harus terus diperjuangkan oleh setiap generasi.

Menutup pembahasan ini, dinamika ekonomi Indonesia membuktikan bahwa bangsa ini memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi krisis (Shodiq dan Maula, 2025). Meskipun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, arah pembangunan ekonomi Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang positif menuju negara maju. Konsistensi dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Dengan semangat gotong royong dan inovasi tanpa henti, Indonesia optimis dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya sesuai dengan amanat konstitusi. Perjalanan sejarah telah menempa bangsa ini menjadi lebih bijak dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat demi kemaslahatan bersama.

## **KESIMPULAN**

Evolusi perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan menunjukkan transformasi signifikan yang dipicu oleh perubahan rezim politik dan kebijakan strategis pemerintah. Orde Lama gagal membangun fondasi yang stabil akibat dominasi kepentingan politik dan hiperinflasi, sementara Orde Baru mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi melalui industrialisasi namun terhambat oleh praktik KKN serta ketimpangan sosial yang dalam. Era Reformasi memperkenalkan paradigma baru melalui desentralisasi fiskal, keterbukaan ekonomi, dan akselerasi digital yang mendorong pertumbuhan lebih inklusif. Temuan utama menegaskan bahwa stabilitas politik, transparansi tata kelola, dan pemerataan hasil pembangunan merupakan pilar mutlak bagi keberlanjutan ekonomi nasional. Implikasinya, pemerintah masa kini harus terus memperkuat ekonomi hijau dan transformasi digital secara merata guna memitigasi ketimpangan sosial di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd., and M.Pd. Nurjannah, S.Pd. 2023. *PEREKONOMIAN INDONESIA*. Edited by M.E. Dr. Rahmatullah, S.Pd. Cetakan 1. CV TAHTA MEDIA GROUP.
- Dwi Lestari, Anisa Ayu, and Alit Merthayasa. 2022. "Peran Teknologi Dalam Perubahan Bisnis Di Era Globalisasi." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (11): 16706–11.

<https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V6i6>.

- Dwicahyo, Satrio. 2022. "Pertumbuhan Ekonomi Di Era Orde Baru." *Lembaran Sejarah* 10 (2): 176–79. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23707>.
- Dzaki, Muhammad Amir, and Eko Ribawati<sup>4</sup> Rima Rahmawati, Ahmad Deedat Al-Haris. 2024. "Kondisi Sosial Ekonomi Indonesia Pada Masa Reformasi." *Cendekia Pendidikan* 5 (5): 1–10.
- Fahrika, Andi Ika, and Zulkifli. 2020. *PEREKONOMIAN INDONESIA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA*. Edited by M.Ak Dahlia, S.Pd., M.Si and MM Juhasdi, SE. Cetakan 1. makasar: YAYASAN BARCODE.
- Fernandez, Ariel, Gadis Anggraini Safitri, and Siti Tiara Maulia. 2024. "MENUJU ERA REFORMASI : PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN PEMERINTAHAN INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3 (6).
- Hadi, Qonita Mayla, Sabrina Salsabila, Riyan Hidayat, and Eko Ribawati. 2024. "Dinamika Ekonomi Indonesia Era Reformasi: Perubahan, Tantangan Dan Prospek Masa Depan." *Cendekia Pendidikan* 5 (6): 1–10.
- Hasan, Abdul Azis. 2021. "Pemerintahan Pada Masa Transisi Pergantian Kepala Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Akta Yudisia* 5 (2): 138–57. <https://doi.org/10.35334/ay.v5i2.1913>.
- HERMANITA, SE. M.M. 2021. *PEREKONOMIAN INDONESIA*. Edited by M.Si Suci
- Hayati, MSI Husnul Fatarib, Lc., MA., Ph.D Dr. Oriza Agustin. Cetakan 1. Lampung: CV. Agree Media Publishing.
- Klaudia, Maria Winda, and Ida Bagus Nyoman Wartha. 2020. "Perkembangan Politik Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999." *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)* 10 (1): 1–7. <https://doi.org/10.36733/jsp.v10i1.699>.
- Mawar Az-Zahra, Chelsea, Hanin Anggraini, Rangga Ananta, Heni Noviarita, Ekonomi Syariah, Ekonomi Dan Bisnis Islam, and Uin Raden Intan Lampung. 2024. "SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA KRISIS EKONOMI PADA MASA REFORMASI." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1 (6): 10183–93. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Ningrum, Siti Utami Dewi. 2023. "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Indonesia." *Lembaran Sejarah* 19 (1): 58–77. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.86451>.

- Rahman, Abdul. 2023. "Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Pada Masa Orde Lama." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Humaniora*, 1–14.
- Rakhman, Akhmad Syaekhu, and Arief Hidayat. 2022. "Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)." *Kebijakan Ekonomi Soekarno Pada Masa Ekonomi Terpimpin 5* (1): 1–10.
- Shaleha, Puspa Unsyah, Anita Selviana, and Indra Muharman. 2024. "Sejarah Perkembangan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru Dan Pengaruh Krisis Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia." *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah* 14 (2): 41–46. <https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.124>.
- Shodiq, Ahmad, and Farihana Lutfiatul Maula. 2025. "Paradigma Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi." *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8 (1): 698–713. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.5644>.
- Solihah, Ratnia. 2023. "Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking." *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik* 1 (1): 41–52. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10546>.
- Supriatin, Dyah, Apit Fathurohman, Siti Lutfiyah, Amiruddin Qadaar, and Nandang Bektikarnowati. 2022. *BUKU PEREKONOMIAN INDONESIA*. Edited by Suwali. Cetakan 1. Jawa Tengah: TIGA CAKRAWALA.
- Suriadi, Hari, Lince Magriasti, and Aldri Frinaldi. 2023. "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Media Ilmu* 2 (2): 193–210. <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Wijayanti, Yeni. 2022. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Masa Orde Lama Dibidang Ekonomi Terhadap Bisnis Orang Cina." *Journal of Chemical Information and Modeling* 3 (2): 113–18.